

**PERAN SUMBER INFORMASI
DALAM MENINGKATKAN PENCAPAIAN PENDIDIKAN DASAR
UNTUK SEMUA**
Sri Suharmini W¹
minuk@ut.ac.id

ABSTRAK

Informasi dalam berbagai bentuk dan jenis sangat dibutuhkan oleh masyarakat di manapun berada. Karena informasi tersebut sangat bermanfaat dalam menambah wawasan berbagai bidang ilmu pengetahuan, yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan suatu kebijakan. Dalam dunia pendidikan informasi dapat digunakan sebagai bahan atau materi dalam membeikan pengajaran. Informasi yang digunakan dalam dunia pendidikan adalah yang berkaitan dengan materi-materi pembelajaran. Kebutuhan akan informasi tersebut dapat diwujudkan dengan adanya dukungan dari sumber informasi yang mengumpulkan berbagai jenis dan bentuk informasi baik tercetak maupun terekam. Sumber informasi dapat diwujudkan dengan adanya berbagai jenis perpustakaan, juga perpustakaan biasa maupun perpustakaan digital yang dapat diakses oleh pengguna dari berbagai tempat. Dalam rangka membantu peningkatan pendidikan dasar untuk semua yang menjadi tujuan kedua dari Sasaran Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals (MDGs)*, sumber informasi harus lebih giat menunjang kegiatan pengajaran di berbagai jenis sekolah dengan menyediakan informasi tercetak maupun terekam. Informasi tersebut dapat digunakan oleh warga dilingkungan sekolah. Untuk mencapai tujuan kedua dari MDGs tersebut pemerintah telah menerbitkan suatu peraturan yang menyatakan bahwa setiap sekolah harus mempunyai perpustakaan. Manfaat perpustakaan disini sebagai unit penunjang dalam pembelajaran dan meningkatkan kegemaran anak dalam membaca sehingga anak-anak sekolah tersebut mempunyai wawasan yang luas, disamping materi-materi atau teori dalam pembelaran yang diterima. Dengan adanya peraturan tersebut berarti perpustakaan sebagai sumber informasi harus berperan aktif dalam ikut meningkatkan pencapaian pendidikan dasar untuk semua. Karena tanpa pendidikan dasar yang baik dan benar maka anak-anak Indonesia generasi muda kurang mempunyai landasan yang kuat dalam berperan serta di era globalisasi saat ini.

Key Word : sumber informasi, perpustakaan, tujuan MDGs

¹ Dosen Perpustakaan pada FISIP-UT

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan dapat dilakukan dengan pendidikan secara formal maupun informal. Pendidikan formal melalui sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta. Pendidikan formal dari jenjang sekolah dasar (SD) sampai dengan pendidikan tinggi (PT).

Untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia di sebuah Negara, maka masyarakat di Negara tersebut harus memperoleh pendidikan yang sesuai. Pendidikan bagi masyarakat dimulai dari pendidikan dasar. Di Indonesia agar setiap warga Negara memperoleh pendidikan dasar, maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang diterapkan untuk pendidikan terutama pendidikan dasar. Kebijakan tersebut adalah kebijakan tentang wajib belajar, kebijakan wajib belajar ini mulai diberlakukan secara nasional sejak tahun 1984, yang sering disebut dengan wajib belajar (WAJAR). Samapi saat ini WAJAR bukan lagi untuk SD akan tetapi sudah sampai ke jenjang SMP yang sering disebut dengan WAJAR 9 tahun.

Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi bagi anak-anak yang menempuh pendidikan di pendidikan dasar tersebut (SD-SMP), maka diperlukan suatu sumber informasi yang mempunyai koleksi informasi dari berbagai bentuk, jenis maupun media yang digunakan untuk merekam informasi tersebut. Kumpulan dari berbagai informasi tersebut adalah sumber informasi. Sumber informasi yang dekat dengan kegiatan anak-anak di SD – SMP adalah Perpustakaan. Pada era informasi dan teknologi atau era globalisasi saat ini sumber informasi mudah diperoleh di dunia maya atau Internet. Sehingga peserta didik selain mendapat informasi di perpustakaan sekolah juga dapat memperoleh di perpustakaan maya.

Sasaran Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals (MDGs)* yang merupakan kesepakatan dari kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), mempunyai target tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Dari target tersebut diturunkan menjadi beberapa tujuan, salah satu tujuannya adalah pendidikan dasar untuk semua. Pendidikan dasar ini merupakan fondasi/dasar dari kehidupan masyarakat di masa yang akan datang. Apabila pendidikan dasarnya kuat maka pengembangan pendidikan maupun pengembangan diri akan mudah menyesuaikan diri dalam masyarakat luas.. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dasar untuk semua yang dicanangkan dalam kesepakatan MDGs, maka sumber informasi diperlukan dan akan dicari oleh masyarakat pendidikan dalam hal ini adalah peserta didik dan pendidik.

B. Millennium Development Goals (MDGs)

Millennium Development Goals (MDGs) dalam bahasa Indonesia adalah Sasaran Pembangunan Milenium. *MDGs* ini merupakan suatu kesepakatan dan kemitraan global untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat yang ditunjukkan dalam delapan tujuan pembangunan, dengan batas waktu dan target terukur. Target utamanya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam **Deklarasi Milenium**. Deklarasi tersebut diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000. Negara Indonesia termasuk salah satu yang menandatangani deklarasi tersebut. Para pemimpin dunia yang menandatangani deklarasi millennium berkomitmen untuk mengurangi separuh lebih jumlah orang-orang yang menderita kemiskinan dan kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan gender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3, dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.

Dasar hukum dikeluarkannya deklarasi MDGs adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 55/2 Tanggal 18 September 2000, (*A/Ris/55/2 United Nations Millennium Development Goals*). Deklarasi ini merupakan kesepakatan anggota PBB mengenai sebuah paket arah pembangunan global yang dirumuskan dalam beberapa tujuan yaitu:

1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan,
2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua,
3. Mendorong Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan,
4. Menurunkan Angka Kematian Anak,
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu,
6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya,
7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dan
8. Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.

Dengan penandatanganan deklarasi tersebut, maka Indonesia juga berkomitmen untuk berperanserta dalam pencapaian tujuan MDGs. Dalam rangka menjalankan komitmen tersebut di Indonesia MDGs dijadikan referensi dalam pembangunan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Sehingga arah kebijakan

pembangunan disesuaikan dengan tujuan MDGs, terutama pembangunan yang berkaitan dengan kedelapan tujuan atau sasaran dari MDGs.

C. PENDIDIKAN DASAR

Mencapai pendidikan dasar untuk semua, merupakan tujuan kedua dari MDGs. Pendidikan dasar untuk semua diharapkan setiap penduduk dunia mendapatkan pendidikan dasar. Karena pendidikan dasar ini merupakan fondasi sebuah pendidikan yang diterima oleh anak-anak usia pendidikan dasar. Dengan pendidikan dasar yang kuat, maka anak-anak akan mampu menyerap pendidikan pada tahap berikutnya serta mampu menyesuaikan diri pada masyarakat luas.

Menurut UU RI No. 20 tahun 2003 pasal 17 (2) menjelaskan bahwa pendidikan dasar adalah berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah. Selain itu dalam bab VIII pasal 34 pada UU yang sama dinyatakan bahwa (1) Setiap warga Negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar, (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Sehingga program pendidikan dan program wajib belajar ini adalah program pemerintah yang dibelakukan secara nasional. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat harus mendukung kelancaran program tersebut demi meningkatkan pengetahuan dan sumber daya manusia yang berkompeten serta mempunyai latar belakang pendidikan yang baik.

Program wajib belajar di Indonesia telah diterapkan sejak tahun 1984. Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 1984 Presiden Suharto mencanangkan program wajib belajar 6 tahun. Program tersebut bertujuan anak-anak seusia sekolah SD yaitu 6 -12 tahun dapat mengenyam pendidikan dasar dan lulus pendidikan dasar (kelas 6). Perkembangan pengetahuan dan teknologi yang makin cepat dirasakan wajib belajar 6 tahun masih kurang menunjang kehidupan masyarakat. Maka dalam rangka memperluas kesempatan belajar pendidikan dasar, pada tanggal 2 Mei 1994 pemerintah mencanangkan program pendidikan wajib belajar 9 tahun. Sasaran utama wajib belajar 9 tahun adalah menumbuhkan aspirasi pendidikan orang tua dan peserta didik yang telah cukup umur untuk mengikuti pendidikan, dengan maksud untuk meningkatkan produktivitas angkatan kerja secara makro.

Pendidikan dasar 9 tahun diharapkan bahwa setiap warga negara akan memiliki kemampuan untuk memahami dunianya, mampu menyesuaikan diri bersosialisasi dengan perubahan masyarakat dan jaman, mampu meningkatkan

mutu kehidupan baik secara ekonomi, sosial budaya, politik dan biologis, serta mampu meningkatkan martabatnya sebagai manusia warga negara dari masyarakat yang maju. Di samping itu menurut Hadari Nawawi (1994) dalam Ismail menyatakan bahwa tujuan pendidikan dasar adalah untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

Menurut Wirjomartono dalam Ismail menyatakan bahwa jika perluasan dan mutu pendidikan dilakukan di dalam kerangka keterkaitan, maka pendidikan dasar 9 tahun secara langsung berfungsi sebagai strategi dasar dalam upaya:

- 1) mencerdaskan kehidupan bangsa karena diperuntukkan bagi semua warga negara tanpa membedakan golongan, agama, suku bangsa, dan status sosial ekonomi;
- 2) menyiapkan tenaga kerja industri masa depan melalui pengembangan kemampuan dan keterampilan dasar belajar, serta dapat menunjang terciptanya pemerataan kesempatan pendidikan kejuruan dan profesional lebih lanjut; dan
- 3) membina penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena melalui wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini memungkinkan untuk dapat memperluas mekanisme seleksi bagi seluruh siswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dengan uraian mengenai wajib belajar diatas, pada hakekatnya wajib belajar untuk memenuhi hak asasi setiap warganegara untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua (education for all). Bertujuan agar setiap warganegara memperoleh pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan dalam rangka berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan kebijakan wajib belajar tersebut pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah sangat aktif dalam menuntaskan program wajib belajar 9 tahun, sebagai bukti bahwa pemerintah berperan aktif adalah:

1. Pemerintah mampu meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam mensukseskan penuntasan wajib belajar sembilan tahun.
2. Pemerintah mampu meningkatkan peran, fungsi dan kapasitas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan dalam penuntasan wajib belajar di daerah masing-masing.
3. Pemerintah mampu menurunkan angka putus sekolah.

4. Pemerintah mengucurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar SD maupun SMP.
5. Pemerintah mampu melindungi siswa, guru dan perangkat kurikulum yang berlaku serta menyediakan sarana dan prasarana.

Program wajib belajar adalah program nasional, maka untuk mensukseskan program ini, perlu kerjasama yang menyeluruh antara lain :

- a) Pemerintah pusat (Mendiknas, Menko Kesra, Mendagri, Menkeu, Menpan/Ketua Bappenas, Menag, Mensos, Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Perindustrian, Menakertrans, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kominfo, Meneg Lingkungan Hidup, Meneg Pemberdayaan Perempuan, Meneg Pembangunan Daerah Tertinggal, Meneg Pemuda dan Olah Raga, Meneg BUMN, Kepala Badan Pusat Statistik.
- b) Pemerintah Propinsi (Dinas Pendidikan Provinsi).
- c) Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota).
- d) Pemerintah Dinas Pendidikan Kecamatan.
- e) Kelurahan.

Tujuan kedua dari MDGs adalah pencapaian pendidikan dasar untuk semua, berarti diharapkan adanya pemerataan pendidikan dasar untuk perempuan maupun laki-laki, dengan jaminan semua anak dapat menyelesaikan sekolah dasar, dan tetap mengikuti pendidikan di sekolah dengan kualitas pendidikan yang baik.

MDGs dicanangkan pada tahun 2000, sedangkan di Indonesia jauh sebelumnya yaitu tahun 1984 sudah mencangkan pendidikan dasar untuk semua. Kebijakan tersebut bukan saja untuk sekolah dasar (SD) melainkan sudah sampai ketingkat sekolah lanjutan pertama (SMP), dengan kebijakan pemerintah yang dikenal dengan wajib belajar (WAJAR) 9 tahun yang dicanangkan pada tahun 1994. Seharusnya Indonesia sudah dapat mengentaskan pendidikan dasar untuk anak-anak usia pendidikan dasar pada saat dicanangkan MDGs tersebut. Akan tetapi karena perkembangan pengetahuan begitu pesatnya maka penuntasan wajib belajar belum berhasil 100%. Akan tetapi peningkatan anak dalam mengenyam pendidikan dasar sudah baik, dapat dilihat pada angka partisipasi di sekolah dasar mencapai 94.7 persen (Kita Suarakan MDGs). Dengan angka partisipasi tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia sudah cukup berhasil untuk memberikan pendidikan pada anak usia pendidikan dasar.

Untuk lebih mengetahui keberhasilan yang dicapai Naimah Lutfi (2012) memberikan 3 cara dalam mengukur keberhasilan tercapainya pendidikan yaitu:

- 1) Jumlah anak yang dapat bersekolah di Sekolah Dasar
- 2) Proporsi anak yang lulus Sekolah Dasar
- 3) Angka kemampuan membaca dan menulis pada masyarakat usia 15-24 tahun, baik perempuan maupun laki-laki.

Dengan tiga cara tersebut secara kuantitatif akan terlihat data yang pasti dari keberhasilan di bidang pendidikan, seperti tujuan MDGs.

D. SUMBER INFORMASI

Secara sederhana informasi diartikan sebagai sekumpulan data yang telah diolah sehingga mempunyai arti. Ada seorang ahli bernama Shannon yang mengatakan bahwa informasi adalah sesuatu yang membuat pengetahuan kita berubah, yang secara logis mensahkan perubahan, memperkuat atau menemukan hubungan yang ada pada pengetahuan yang kita miliki. Definisi ini memberikan pengertian bahwa informasi dapat mengubah pengetahuan yang dimiliki seseorang, bisa mengganti pengetahuan yang dimilikinya atau justru memperkuat dan menambah pengetahuan yang dimiliki seseorang. Dengan perubahan pengetahuan tersebut maka seseorang dapat mengubah pola hidupnya baik kearah yang positif maupun negative tergantung informasi yang diperolehnya (Saleh). Sulistyio-Basuki dalam tulisannya yang berjudul "Informasi, Komunikasi dan Ilmu Perpustakaan dan Informasi" menyatakan bahwa informasi merupakan data terpilih, terorganisasi dan teranalisis; merupakan hasil dari pengolahan data serta memberikan makna padanya.

Para ahli bidang informasi menyebutkan bahwa informasi adalah pengetahuan yang disajikan kepada seseorang dalam bentuk yang dapat dipahami, atau data yang telah diproses, ditata untuk menyajikan fakta yang mengandung arti (dalam Yusup: 2012, 21).

Dari berbagai pengertian informasi di atas berarti informasi itu adalah isi, sedangkan wadah atau tempat yang digunakan untuk menempatkan isi tersebut disebut sumber informasi. Dengan demikian ada berbagai jenis sumber informasi. Jenis sumber informasi seperti buku, atau media lain yang digunakan untuk merekam informasi juga situs-situs di internet. Agar sumber informasi tersebut mudah ditemukan kembali dengan cepat dan tepat maka sumber informasi tersebut harus dikelola dengan suatu sistem yang memadai.

Lembaga yang mengelola sumber informasi adalah pusat sumber informasi. Pusat Sumber informasi dikenal dengan Perpustakaan. Menurut Yusup (2012,

243) perpustakaan disebut sebagai pusat sumber informasi dan sumber-sumber informasi karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Tempat dihimpunnya segala macam (sumber) informasi baik dalam bentuk tercetak maupun noncetak, berupa dokumen analog maupun digital;
- 2) Tempat diolahnya bermacam ragam (sumber) informasi , baik tercetak maupun dalam bentuk rekaman elektronik
- 3) Tempat didistribusikan atau disebarluaskan segala macam (sumber) informasi ke segenap anggota masyarakat yang membutuhkan
- 4) Perpustakaan berfungsi sebagai tempat lahirnya informasi
- 5) Tempat dipeliharanya segala jenis informasi terekam.
- 6) Tempat pewarisan budaya bangsa
- 7) Tempat konsultasi bagi mereka yang membutuhkan keterangan mengenai sesuatu terkait dengan kebutuhan informasi
- 8) Sebagai pusat sumber belajar bersama
- 9) Sebagai lembaga pembelajaran masyarakat penggunanya
- 10) Perpustakaan sebagai gudang ilmu.

Sumber informasi yang pernah diterbitkan di dunia sangat beragam jenisnya. Sumber informasi yang dikelola oleh pusat sumber informasi berkaitan erat dengan fungsi pusat sumber informasi yaitu fungsi pendidikan, penelitian dan rekreasi. Hubungan sumber informasi dengan fungsi pendidikan, karena sumber informasi digunakan sebagai materi pengajaran yang diberikan oleh peserta didik.

E. HUBUNGAN SUMBER INFORMASI DENGAN PENDIDIKAN

Seperti telah disebutkan di atas bahwa sumber informasi adalah wadah yang digunakan untuk menempatkan informasi. Ada berbagai jenis sumber informasi yang ada saat ini seperti buku, majalah, surat kabar dan lain-lain. Sedangkan bentuk sumber informasi tersebut adalah tercetak maupun terekam (dalam bentuk digital).

Dalam dunia pendidikan, sumber informasi sangat diperlukan, karena pendidik dalam hal ini pengajar maupun dosen sangat memerlukan sumber informasi dalam rangka memberikan materi kepada peserta didik.

Dalam rangka menambah pengetahuan maupun pengayaan materi dalam dunia pendidikan, diperlukan pusat sumber informasi di setiap instansi pendidikan. Pusat sumber informasi atau lebih dikenal dengan perpustakaan ini merupakan

salah satu sarana dan prasarana pendidikan yang diharuskan ada di instansi sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Karena perpustakaan merupakan salah satu standar sarana dan prasarana pendidikan nasional yang tertuang dalam penjelasan UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional pada pasal 35 ayat 1.

Dalam UU nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dinyatakan jenis-jenis perpustakaan salah satunya adalah Perpustakaan Sekolah. Dalam bagian ketiga pasal 23 (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik. (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.

Dalam ayat 2 dan 3 sudah dijelaskan bahwa Perpustakaan Sekolah wajib memiliki koleksi buku pelajaran serta koleksi lain yang mendukung pelaksanaan pendidikan. Di sini jelas bahwa sumber informasi pendidikan wajib diadakan dan dikelola untuk menunjang pendidikan. Sehingga sumber informasi dapat mendukung tercapainya kompetensi peserta didik (siswa) dalam menyelesaikan pendidikan pada setiap tingkat/levelnya. Juga dapat meningkatkan kemampuan pendidik atau guru dalam memberikan materi pendidikan bagi siswa. Penyediaan pusat sumber belajar ini lebih diperkuat dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional (Kemendikbud) yaitu Permendiknas Nomor 25 tahun 2008 tentang Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Standar Nasional Indonesia (SIN) 7329-2009 tentang Perpustakaan Sekolah. Dalam Permendiknas nomor 25 tahun 2008 dinyatakan bahwa tenaga perpustakaan harus mempunyai kompetensi kependidikan yaitu dalam memahami peran perpustakaan sebagai sumber belajar serta memfasilitasi peserta didik untuk belajar mandiri. Perpustakaan sebagai sumber belajar berarti perpustakaan merupakan tempat untuk menambah pengetahuan atau belajar tambahan disamping belajar di dalam kelas. Perpustakaan sebagai sumber belajar berarti juga perpustakaan merupakan pusat sumber informasi yang digunakan untuk belajar mandiri bagi para siswa, dan sesuai dengan salah satu fungsi perpustakaan yaitu fungsi pendidikan.

Sumber informai dapat berperan dalam pendidikan ini terlihat pada misi perpustakaan sekolah yang tertuang dalam SIN 7329:2009. Misi perpustakaan

tersebut adalah : (a) menyediakan informasi dan ide yang merupakan fondasi agar berfungsi secara baik di dalam masyarakat masa kini yang berbasis informasi dan pengetahuan; (b) merupakan sarana bagi murid agar terampil belajar sepanjang hayat dan mampu mengembangkan daya pikir agar mereka dapat hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Didukung juga dengan tujuan dari perpustakaan sekolah adalah menyediakan pusat sumber belajar sehingga dapat membantu pengembangan dan peningkatan minat baca, literasi informasi, bakat serta kemampuan peserta didik. Sehingga perpustakaan sekolah yang juga sebagai pusat sumber informasi dengan misi dan tujuan yang jelas untuk membantu siswa dalam belajar dan membantu dalam pengembangan serta peningkatan kemampuan peserta didik.

Dari uraian di atas jelas bahwa pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam mengembangkan dan mendukung tercapainya pendidikan dasar untuk semua. Selain mendukung kegiatan belajar mengajar juga mendukung sarana dan prasarana untuk kelancaran belajar mengajar di sekolah, seperti penyediaan pusat sumber informasi (perpustakaan) dalam menyediakan sumber informasi bagi peserta didik. Pengelolaan pusat sumber informasi dan penyediaan sumber informasi yang tepat bagi anak-anak usia pendidikan dasar akan dapat membantu peserta didik dalam pengembangan dirinya.

Pusat sumber informasi saat ini bukan saja di perpustakaan, karena dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat menjadikan perkembangan perpustakaan menjadi perpustakaan digital atau virtual maupun perpustakaan maya. Ketiga jenis perpustakaan tersebut dapat diakses dari berbagai tempat penjuru dunia menggunakan jaringan komunikasi yang sering disebut dengan Internet. Dengan kecanggihan Internet dan kecepatan akses melalui komunikasi jaringan, maka sumber informasi sangat mudah didapatkan. Internet tidak mengenal waktu seperti perpustakaan yang dibatasi dengan waktu penggunaan. Peserta didik untuk saat ini sangat mudah mencari informasi yang dibutuhkan bukan saja di perpustakaan yang dapat digunakan dalam jam sekolah, tetapi dapat mencari informasi sebagai pengayaan di luar jam sekolah dengan mengaksesnya di perpustakaan maya atau virtual yang berjaga selama 24 jam. Jadi kapanpun pengguna mencari informasi akan selalau dilayani dengan senang hati.

Dengan demikian sumber informasi dimanapun berada baik tercetak maupun noncetak mudah diakses oleh pengguna, masyarakat umum maupun siswa. Dan sumber informasi tersebut sangat berguna bagi pengembangan diri, penyesuaian diri dengan lingkungan maupun masyarakat luas.

F. SIMPULAN

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Tujuan kedua MDGs yaitu pendidikan dasar untuk semua, di Indonesia telah melaksanakan pendidikan dasar itu sejak tahun 1984 dengan adanya dicanangkannya wajib belajar 6 tahun.
2. Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Wajib belajar yang diterapkan sampai saat ini adalah wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan sejak tahun 1994.
3. Sumber informasi sangat membantu dalam menunjang kegiatan belajar mengajar bagi siswa. Sumber informasi dapat diperoleh dari pusat sumber belajar yaitu perpustakaan maupun Internet yang dapat diperoleh tanpa batas waktu.
4. Sumber informasi yang diperoleh secara dan tepat, serta digunakan dengan benar akan dapat membantu tercapainya tujuan MDGs pendidikan dasar untuk semua. Karena sumber informasi membuat pengguna menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga masyarakat dapat menyesuaikan pada dunianya serta mampu bersosialisasi terhadap masyarakat yang maju. Dengan demikian masyarakat Indonesia akan menjadi masyarakat maju dan sejajar dengan masyarakat dibelahan dunia yang lain, sehingga tujuan kedua MDGs akan tercapai.

KEPUSTAKAAN

- Ismail, Muhammad Ilyas (2009) Pendidikan Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
<http://www.gudangmateri.com/2010/06/pendidikan-wajib-belajar-9-tahun.html> 9-7-2012
- Lutfi, Naimah (2012) Indonesia dan MDGs 2015: Tantangan Pendidikan.
<http://parlemenmuda.org/newsite/?p=220> 29-5-2012
- MDGs Merupakan Referensi Penting bagi Pembangunan di Indonesia.
<http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/116-desember-2010/994-mdgs-merupakan-referensi-penting-bagi-pembangunan-di-indonesia.html> 4-5-2012
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
- Q&A on MDG http://www.unicef.org/indonesia/id/reallives_10625.html 29-5-2012
- Sasaran Pembangunan Milenium
http://id.wikipedia.org/wiki/Sasaran_Pembangunan_Milenium 4-5-2012

Standar Nasional Indonesia 7329:2009 tentang Perpustakaan Sekolah

Sulistyo-Basuki, dkk (2006) *Perpustakaan dan Informasi Dalam Konteks Budaya*.
Depok: Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Universitas Indonesia.

Yusup, Pawit M. (2012) *Perspektif Manajemen Pengetahuan Informasi, Komunikasi, Pendidikan, dan Perpustakaan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan